

ISBN : 978-979-562-033-4

# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL

dalam Rangka Dies Natalis ke-51  
Universitas Negeri Yogyakarta  
diselenggarakan di UNY, 20-21 April 2015



Tema  
*Penelitian dan PPM  
untuk Mewujudkan Insan Unggul*

### **Buku 2.**

## **Bidang Humaniora**

*Penyunting:*

Prof. Dr. Suharti

Prof. Dr. Endang Nurhayati

Dr. Enny Zubaidah

Dr. Tien Aminatun

Dr. Giri Wiyono

Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Ary Kristiyani, M.Hum.

Zulfi Hendri, M.Sn.

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

dalam Rangka Dies Natalis ke-51  
Universitas Negeri Yogyakarta  
diselenggarakan di UNY, 20-21 April 2015



Tema  
*Penelitian dan PPM  
untuk Mewujudkan Insan Unggul*

## **Buku 2. Bidang Humaniora**

*Penyunting:*

Prof. Dr. Suharti

Prof. Dr. Endang Nurhayati

Dr. Enny Zubaidah

Dr. Tien Aminatun

Dr. Giri Wiyono

Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Ary Kristiyani, M.Hum.

Zulfi Hendri, M.Sn.

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

# Prosiding Seminar Nasional

dalam Rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta ke-51

## Penelitian dan PPM untuk Mewujudkan Insan Unggul

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

*All right reserved*

2015

**ISBN: 978-979-562-033-4**

### Penyunting:

Prof. Dr. Suharti

Prof. Dr. Endang Nurhayati

Dr. Enny Zubaidah

Dr. Tien Aminatun

Dr. Giri Wiyono

Sri Harti Widyastuti, M.Hum.

Ary Kristiyani, M.Hum.

Zulfi Hendri, M.Sn.

Venny Indria Ekowati, M.Litt.

### Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Negeri Yogyakarta

### Alamat Penerbit:

Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 550840, 555682, Fax. (0274) 518617

*Website: [lppm.uny.ac.id](http://lppm.uny.ac.id)*

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA LPPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Seminar Nasional hasil penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) ini dapat terwujud. Buku ini merupakan prosiding seminar yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 April 2015 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan PPM yang telah dilakukan oleh baik oleh bapak/ibu dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta maupun para dosen dan peneliti di perguruan tinggi serta institusi-institusi lain di Indonesia. Buku ini terwujud karena adanya kerja keras dari tim dalam kepanitiaan seminar nasional. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. yang telah memfasilitasi semua kegiatan seminar nasional ini.
2. Bapak/ibu segenap panitia seminar nasional yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini.
3. Bapak/ibu dosen dan mahasiswa yang telah menyumbangkan artikel hasil penelitian dan PPM, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi manfaat bagi kita semua untuk kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, budaya, dan olah raga. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam upaya pembangunan bangsa dan negara.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Yogyakarta, 10 April 2015

Ketua LPPM UNY,



Prof. Dr. Anik Ghufron  
NIP. 19621111 198803 1 001

## SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya, sehingga buku *Prosiding Seminar Nasional* dengan tema: *Penelitian dan PPM untuk Mewujudkan Insan Unggul* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku prosiding ini berisi 174 artikel penelitian dan PPM dari para peneliti dan pengabdian pada masyarakat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini terbagi menjadi empat bidang, yaitu kependidikan, humaniora, saintek, dan PPM.

Buku prosiding ini merupakan wujud kerja keras dari tim panitia yang telah bekerja dari awal sejak pembukaan pendaftaran abstrak sebagai pemakalah pendamping, seleksi abstrak, pengelompokan bidang, pengumpulan *full paper*, sampai dengan proses penyuntingan. Oleh karena itu, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan forum-forum ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Ketua LPPM UNY yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga buku prosiding ini dapat terwujud.
3. Semua pemakalah yang telah memberikan sumbangan artikel sehingga buku prosiding ini menjadi lebih berbobot, berkualitas, dan variatif karena berasal dari berbagai bidang ilmu.

Kami berharap buku prosiding ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini diharapkan pula dapat memicu semangat para pembaca untuk terus meneliti dan tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya bagi pengembangan potensi masyarakat melalui kegiatan PPM.

Walaupun berbagai upaya telah kami lakukan untuk kesempurnaan buku ini, namun kami sadar bahwa buku ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran agar buku ini lebih sempurna dan lebih berkualitas.

Yogyakarta, 10 April 2015

Ketua Panitia,

  
Sri Harti Widayastuti, M. Hum.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LPPM UNY .....	i
Kata Pengantar Ketua Panitia Seminar Nasional .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### BIDANG HUMANIORA

1. Perbandingan Perkembangan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Indonesia dan Belanda <b>Eny Kusdarini, Setiati Widiastuti, Dan Candra Dewi Puspitasari .....</b>	<b>1</b>
2. Efisiensi dan Efektivitas Tatakelola Industri Rumah Tangga “Kerupuk Ubi Kamang” Di Kecamatan Kamang Magek <b>Hasdi Aimon, Yeniwati .....</b>	<b>21</b>
3. Hambatan Ukm Batik Kayu dalam Menembus Pasar Ekspor <b>Kiromim Baroroh*, Sudji Munadi, Nur Hidayah .....</b>	<b>35</b>
4. Pengembangan Koperasi Siswa sebagai Model Pendidikan Karakter Di SMK Yogyakarta <b>Sukidjo, Ali Muhson, Mustofa .....</b>	<b>52</b>
5. Analisis Risiko Bencana sebagai Arahan Pengelolaan Kebencanaan pada Lembah antar Gunungapi Merapi-Merbabu Jawa Tengah <b>Nurhadi, Arif Ashari, Suparmini .....</b>	<b>68</b>
6. Pelayanan Transportasi Publik Bagi Pemenuhan Kaum Difabel di daerah Istimewa Yogyakarta <b>Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana .....</b>	<b>89</b>
7. Analisa Reliabilitas Manusia dengan Fuzzy Cream di PT XYZ sebagai Dasar Rekomendasi Perbaikan Perusahaan <b>Tutik Farihah, Rini Dharmastiti, Alva Edy Tontowi, Budi Hartonoandy Rahadiyan .....</b>	<b>108</b>
8. Analisis <i>Structure Conduct Performance</i> Industri Surat Kabar Harian di Daerah Istimewa Yogyakarta <b>Aula Ahmad hafidh, Maimun Sholeh, Tejo Nurseto .....</b>	<b>118</b>
9. Fitoterapi Penyakit Kandungan dalam Manuskrip-Manuskrip Jawayang Tersimpan di Yogyakarta <b>Sri Harti Widyastuti, Hesti Mulyani, dan Venny Indria Ekowati .....</b>	<b>137</b>
10. Perencanaan Riset Pasar untuk Usaha Baru Pupuk Organik Cair <b>Budi Mulyono, Theodorus B. Hanandoko .....</b>	<b>147</b>

11. Perencanaan Riset Pasar untuk Usaha Baru Aluminium Panniers Box pada Kendaraan Roda Dua <b>Agam Listiyanto, Theodorus B. Hanandoko</b> .....	<b>165</b>
12. Perencanaan Riset Pasar Pengembangan Usaha Budidaya Lobster Air Tawar di Daerah Istimewa Yogyakarta <b>Theodorus B. Hanandoko, I. Herbanu Aji A.</b> .....	<b>182</b>
13. Perencanaan Riset Pasar untuk Produk Baru Diadrat <b>Theodorus B. Hanandoko, Teofilus Gogor B.</b> .....	<b>198</b>
14. Perencanaan Riset Pasar untuk Produk Baru Keripik Pisang Coklat <b>Y. Tatag Nugroho, Theodorus B. Hanandoko</b> .....	<b>213</b>
15. Perencanaan Riset Pasar Untuk Pengembangan Produk Kreatif Tas Lukis Berbahan Goni <b>Yosafat Riandanu H., Theodorus B. Hanandoko</b> .....	<b>230</b>
16. Pencarian Data Pengungsi pada Database PMI Menggunakan Algoritma Biner (Studi Kasus di PMI Kota Magelang) <b>Nuryanto, R. Arri Widyanto, M. Ikhwan Syarifudin</b> .....	<b>284</b>
17. Mitigasi Bencana Alam Tsunami Bagi Komunitas SDN 1 Lendah Kulon Progo <b>Yusman Wiyatmo</b> .....	<b>256</b>
18. Pola Hubungan SMK <i>Indigenous Wisdom</i> Tri Hita Karana <b>Putu Sudira, Suminto A. Sayuti, Nyoman Suastika</b> .....	<b>265</b>
19. Pengembangan Model Ilmu Sosial <i>Profetik</i> Berbasis <i>Indigeneous</i> sidi Fakultas Ilmu Sosial UNY <b>Nasiwan, Ajat Sudrajat, Cholisin</b> .....	<b>284</b>
20. Nilai-Nilai Kearifan Hamemayu Hayuning Bawana Dalam Mewujudkan Sekolah Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Karakter Cinta Lingkungan dalam Upaya Mengurangi Pemanasan Global <b>WagiranSatin, Bambang Ruwanto</b> .....	<b>310</b>
21. Dampak Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKUM) dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat <b>Entoh Tohani</b> .....	<b>324</b>

22. Desain Kemasan Produk Seni Budaya Lokal ke Mancanegara melalui <i>Pasugatan Dinner Package</i> Berbasis <i>Multilingual Cultural Approach</i> di Kraton Yogyakarta <b>Endang Nurhayati, Suharti, R.A. Rahmi D Andayani</b> .....	<b>343</b>
23. Studi Eksplorasi Peranan Kebijakan Sektor Informal terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro Yogyakarta <b>Mustofa</b> .....	<b>361</b>
24. Nilai Penting Keanekaragaman Tanaman dan Hewan di Lahan Pekarangan bagi Kehidupan Masyarakat di Kawasan Lereng Merapi <b>Suhartini, Djalal Tandjung, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni</b> .....	<b>374</b>
25. Estetika Manipulatif Dan Dehumanitatif Dalam Iklan <b>Kasiyan</b> .....	<b>389</b>
26. Membangun Kelembagaan Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis <i>Democratic Governance</i> <b>Anastasia Murdyastuti, Hermanto</b> .....	<b>399</b>
27. Transformasi Bentuk dan Fungsi Topeng sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Tari <b>Endang Sutiyati, Wenti Nuryani, Bambang Setiyo</b> .....	<b>418</b>
28. Pendidikan Hak Politik Perempuan Pemuda Perdesaan <b>Nur Endah Januarti, Nur Hidayah, Puji Lestari</b> .....	<b>434</b>
29. Politik Muhammadiyah dalam Pemilu DPD 2014: Kasus Yogyakarta dan Sulawesi Selatan <b>Amika Wardana, Puji Lestari dan Poerwanti Hadipratiwi</b> .....	<b>451</b>
30. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul Berdasarkan Karakteristik Spasial <b>Suhadi Purwantara, Sugiharyanto, Nurul Khotimah</b> .....	<b>472</b>
31. Model Pengembangan Desa Wisata Brayut Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Lereng Merapi Kabupaten Sleman <b>Hastuti, Nurul Khotimah</b> .....	<b>483</b>
32. Mengungkap Karakter Manusia Jawa melalui Simbolisasi Makanan Tradisional Jawa dalam Serat Centhini <b>Sutrisna W, Endang N, Prihastuti E, Venny Indria E, dan Avi Meilawati</b> .....	<b>495</b>
33. Tinjauan Atas Pemahaman Makna “Ogoh-Ogoh” Bagi Masyarakat Yang Melaksanakan Nyepi Di Bali <b>GPB Suka Arjawa</b> .....	<b>506</b>



## PENDIDIKAN HAK POLITIK PEREMPUAN PEMUDA PERDESAAN

Nur Endah Januarti, MA, Nur Hidayah, M.Si., Puji Lestari, M.Hum.  
Jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY  
Email : endahjanuarti@uny.ac.id  
HP. +6285292221191

### Abstrak

Kontradiksi adat dan dinamika politik di perdesaan mempengaruhi proses perkembangan masyarakat. Ideologi patriarkhi yang meletakkan posisi kaum laki-laki sebagai sektor kuasa atas perempuan khususnya di perdesaan yang masih melekat sistem adat dan nilai tradisional. Keberadaan jaminan tentang kebebasan ataupun representasi kaum perempuan di dunia politik bukan menjadi satu angin segar bagi para perempuan. Aktivitas perempuan masih sangat lekat dengan ranah domestik. Mencermati partisipasi pemuda dalam organisasi sebagai implementasi hak politik perempuan di perdesaan, masih terdapat batasan akses dan partisipasi perempuan. Dari studi di Karang Taruna Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY jumlah keseluruhan anggota sekitar 1.200 orang (tahun 2013). Jumlah pengurus 40 orang (persebaran 18 dusun) dengan komposisi 32 laki-laki (80%) dan 8 perempuan (20%). Jabatan strategis Ketua ditempati oleh laki-laki dan jabatan perempuan adalah Sekretaris atau urusan administrasi. Jumlah pengurus perempuan sebanyak kurang lebih 8 orang yang aktif hanya sekitar 50% (4 orang) orang. Dari 18 unit dusun (unit) posisi Ketua semuanya dipimpin oleh laki-laki (100%). Posisi perempuan kebanyakan berada di sekretaris dan bendahara. Data lapangan menyebutkan masih ada anggapan bahwa apabila perempuan menjadi ketua karang taruna di tingkat dusun ditakutkan tidak bisa menjalin komunikasi dengan unsur tokoh dan pemuda itu sendiri. Dari sisi perempuan, masih enggan dan memilih untuk *manut* kepada teman laki-laki.

Kegiatan pendidikan dilakukan dengan metode *brainstorming*, diskusi dan tanya jawab materi. *Brainstorming* untuk mengungkapkan kondisi nyata di lapangan terkait minimnya peran perempuan di dunia politik. Dari proses ini ditemukan bahwa (1) kajian agama sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keberadaan atau posisi seorang pemimpin dalam organisasi dan masyarakat; (2) Peran pihak ketiga (pembantu, asisten rumah tangga, saudara, lembaga) yang kurang diminati di masyarakat desa sehingga perempuan beraktivitas di ruang domestik dan laki-laki di lingkungan publik; (3) Pola pikir dan pemahaman perempuan yang minim terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam urusan politik di organisasi dan masyarakat.

Pada proses berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab materi. Materi yang didiskusikan tentang seks dan gender, ideologi patriarkhi dan politik perempuan. Pada proses ini semua peserta membangun konsep terkait permasalahan dan solusi yang dihadapi. Salah satu hasil analisa peserta adalah perlunya pembagian peran secara terbuka antara laki-laki dan perempuan dapat dibiasakan di dalam keluarga dan forum-forum kecil. Serta semakin diperlukannya pihak ketiga untuk keluarga baik yang bersifat personal maupun kelembagaan dalam rangka membantu keluarga yang memiliki aktivitas karir maupun politik di masyarakat. Perempuan menjadi lebih memahami hak politik meskipun di lingkungan perdesaan. Hal tersebut disadari perlu dilatih dari saat ini melalui kegiatan organisasi kepemudaan.

*Kata kunci* : pendidikan, hak politik perempuan, pemuda, perdesaan

## PENDAHULUAN

Dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan telah menjadi tatanan yang berakar pada sejarah panjang kehidupan manusia di Indonesia. penempatan perempuan sebagai *second class* (kelas kedua) di bawah superioritas laki-laki membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan perempuan sebagai makhluk yang dianggap kurang penting dan hanya sebagai pelengkap kepentingan laki-laki. Dalam hal ini terdapat penempatan perempuan yang hanya berada di ranah domestik dan laki-laki berada di ranah publik. Melalui anggapan tersebut yang dianggap benar memunculkan berbagai bentuk tindakan yang kurang menguntungkan bagi perempuan sebagai kelas kedua yakni seperti kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan sebagainya.

Begitu halnya dengan realitas politik di Indonesia. Aktivitas politik yang dianggap sebagai *gawanya* kaum laki-laki menyurutkan perempuan untuk berperilaku aktif seperti halnya laki-laki. Aktivitas politik erat kaitannya dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Adapun rambu-rambu mengenai partisipasi politik yaitu : Pertama, partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku berupa sikap dan orientasi. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik ( Ramlan Surbakti, 2007 : 141 ). Aktivitas politik seperti kemandirian, kebebasan dalam berpendapat dan tindakan agresif masih sangat minim keberadaannya di kalangan perempuan. Selain karena kultur masyarakat yang menganggap perempuan dengan karakter demikian kurang ideal, masih adanya perdebatan tentang perempuan dan sosok kepemimpinan. Meskipun jaminan keterwakilan perempuan sudah dijamin sebesar 30% namun hal ini tetap tidak mampu terpenuhi sebagaimana mestinya dan hanya beberapa gelintir perempuan yang benar-benar secara *heroik* mau dan mampu berjuang di dalam dunia politik.

Apalagi menyoal perpolitikan di aras lokal dan perdesaan. Kultur dan nilai adat istiadat membawa pengaruh yang cukup kuat bagi masyarakat. Ideologi patriarkhi yang meletakkan posisi kaum laki-laki sebagai sektor kuasa atas perempuan khususnya di perdesaan yang masih melekat sistem adat dan nilai tradisional. Jaminan undang-undang tentang kebebasan ataupun representasi kaum perempuan di dunia politik bukan menjadi satu angin segar bagi para perempuan. Aktivitas perempuan masih sangat lekat dengan ranah domestik yang berperan dan punya tanggung jawab utama mengurus anak, pekerjaan rumah dan sebagainya. Politik aras lokal dalam hal ini melibatkan unsur politik secara mikro. Aktivitas politik di tingkat rumah tangga, Rukun Tetangga, Dusun, Desa dan sebagainya. Dari berbagai konteks tersebut dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih sangat minim. Apalagi untuk keputusan menyangkut program dan aktivitas di kampung-kampung. Sosok kepala keluarga atau laki-laki *lah* yang memiliki kuasa penuh

atas hal tersebut. Perempuan cukup mengikuti alur yang telah dibuat dan kemudian menjalankan keputusan yang telah disepakati oleh para lelaki.

Organisasi perempuan di perdesaan seperti PKK, Dasawisma, Kelompok Senam, Posyandu dan sebagainya pada masyarakat terbatas pada aktivitas domestik yang kurang mengarah pada peran perempuan sebagai *counter* kehidupan di masyarakat. Organisasi yang ada pun sekedar untuk melengkapi organisasi kaum pria yang sudah ada. Gerak kerja sebatas arisan, simpan pinjam, perkembangan anak, memasak, dan olahraga. Masih sangat minim keberadaan organisasi perempuan yang memberikan dampak secara politik bagi masyarakat dengan mengikutsertakan perempuan untuk mengambil keputusan politik. Misalnya ada sekalipun partisipasi perempuan sangat minim. Hal tersebut terjadi karena paradigma perempuan yang menganggap bahwa cukup mewakili laki-laki atau mungkin cukup mengikuti keputusan yang sudah ada sehingga perempuan enggan untuk mengikuti kegiatan. Selain itu bisa terjadi karena perempuan lebih memilih mengurus pekerjaan rumah yang masih bertumpuk karena dibebankan kepadanya. Sebagai contoh melacak kondisi perpolitikan di Indonesia. Perempuan dihadapkan pada realitas yang menunjukkan keterwakilannya masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik itu di jajaran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diemban di dalam kerangka perjuangan yang tidak mengenal lelah untuk mencapai kesetaraan di bidang politik.

Permasalahan akses dan kontrol perempuan merupakan agenda yang penting untuk diperjuangkan. Kuota keterwakilan politik bagi perempuan memperlihatkan bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai *vote getter* (pengumpul suara) saja untuk memenangkan para kandidat pemimpin yang akan dipilih. Perempuan justru hanya dijadikan *supporter* dan alat memenuhi syarat agar sekelompok golongan atau partai politik tertentu dapat melenggang masuk dalam pertempuran politik. Perempuan tidak mempunyai akses dan kontrol yang kuat untuk memonitoring jalannya pemerintahan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kondisi demikian tentunya sangat dipengaruhi oleh pendidikan di bidang politik. Tidak hanya untuk perempuan, namun juga untuk laki-laki. Untuk perempuan yang sebenarnya harus tau benar tentang keberadaannya di masyarakat dan hak-hak politik yang melekat kepadanya, serta kaum laki-laki yang juga harus mengerti hak politik perempuan agar tidak menempatkan perempuan pada kelas kedua yang cukup mengikuti apa yang sudah disepakati oleh kaum laki-laki. Minimal keberadaan perempuan diberikan ruang dan jaminan dalam bidang politik. Sehingga proses penyadaran dan pendidikan politik bagi perempuan tidak cukup diberikan di sekolah sebagai sebuah penyadaran teori namun perlu adanya pendekatan langsung di lapangan dan dibiasakan sejak dini.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui keluarga, komunitas pemuda, masyarakat dan lain sebagainya. Pada ruang tersebut memungkinkan terjadinya proses pemahaman sejak awal mengenai hak-hak politik perempuan sehingga pada prakteknya akan lebih diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan beberapa bentuk kesempatan lain di masyarakat. Tidak sekedar pemberian jaminan namun kemudian diarahkan pada keberanian perempuan untuk aktif, agresif dan mengimplementasikan hak-hak politiknya. Sehingga sangat penting untuk dapat memaksimalkan segala sarana yang ada di masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi dan pembelajaran.

Karang Taruna sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat yang turut memberikan peran dalam proses pendidikan khususnya pendidikan politik. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pada proses demikian Karang Taruna memiliki ruang yang cukup untuk dapat diakses oleh pemuda dan masyarakat sehingga memiliki manfaat untuk dapat membangun dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya pemuda.

Begitu halnya yang terjadi di Karang Taruna Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi pemuda yang berada di wilayah perdesaan desa dengan struktur masyarakat yang masih sangat erat dengan nilai-nilai adat dan tradisi ini menjadi salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun pengetahuan dan kemampuan para anggotanya. Karang Taruna ini cukup aktif, memiliki beberapa prestasi sampai di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta serta pernah menjuai tuan rumah Pertukaran Karang Taruna tingkat Nasional. Jumlah anggota Karang Taruna Desa Sendangsari sekitar 1.200 orang (Profil Karang Taruna Desa Sendangsari tahun 2013). Dari kurang lebih 40 pengurus yang berasal dari 18 dusun di Desa Sendangsari, posisi-posisi strategis seperti Ketua masih ditempati oleh laki-laki. Perempuan erat dengan jabatan Sekretaris atau urusan administrasi. Selain itu dari jumlah pengurus perempuan sebanyak kurang lebih 8 orang saat ini yang aktif hanya sekitar 50% (4 orang) orang perempuan. Lebih lanjut lagi ketika diidentifikasi dari 18 unit dusun yang berada di bawah koordinasi Karang Taruna Desa Sendangsari, posisi Ketua Unit Karang Taruna untuk masing-masing dusun semuanya dipimpin oleh laki-laki. Posisi perempuan kebanyakan berada di sekretaris dan bendahara. Masih ada anggapan

bahwa kalau perempuan menjadi ketua karang taruna di tingkat dusun ditakutkan tidak bisa menjalin komunikasi dengan unsur tokoh dan pemuda itu sendiri. Selain itu beberapa anggota karang taruna dalam hal ini laki-laki agak kurang *sreg* dengan ketua seorang perempuan. Perempuan itu sendiri enggan dan memilih untuk *manut* kepada teman laki-laki.

Dari beberapa kondisi permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan peran dan posisi perempuan merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh perempuan itu sendiri maupun laki-laki. Pengetahuan tentang hak-hak politik perempuan di tingkat desa menjadi satu agenda penting untuk bisa ditelaah karena struktur dan tatanan desa yang masih sangat erat dengan nilai adat istiadat dan budaya. Sehingga perempuan dan laki-laki memahami bahwa perempuan pun memiliki peran dan hak politik yang sama dan sejajar. Dari beberapa hal tersebut, agenda yang perlu untuk dilakukan adalah pendidikan politik bagi perempuan salah satunya pada organisasi kepemudaan. Sehingga dalam beraktivitas di masyarakat perempuan juga menjadi pihak yang sadar secara kritis, aktif, tanpa tekanan terhadap berbagai keputusan politik, tidak hanya sekedar ikut-ikutan suara mayoritas di tengah masyarakat. Perempuan memiliki kepercayaan diri sedari awal di masa muda sehingga ke depan Indonesia memiliki perempuan-perempuan yang berani dan mau turut memikirkan nasib bangsa ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

### **Rumusan Masalah**

Masih minimnya perempuan yang mengetahui dan menyadari benar terkait hak-hak politik sebagai warga negara menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Tekanan sosial masyarakat yang masih menempatkan perempuan para kelas kedua menyebabkan enggan nya perempuan membagi waktu dan menggunakan kesempatan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik baik di tingkat perdesaan maupun nasional. Kesadaran dan pengetahuan laki-laki untuk turut memberikan ruang dan jaminan terhadap kebebasan perempuan menggunakan hak politiknya pun masih terbatas.

Dari identifikasi situasi dan kondisi di lapangan maka muncul beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pemuda perdesaan terkait hak-hak politik perempuan selama ini ?
2. Mengapa partisipasi politik perempuan di perdesaan masih kurang?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan hak politik bagi perempuan bagi pemuda perdesaan?

## **METODE**

Instrumen yang digunakan pada kegiatan ini adalah media diskusi berupa peta perpolitikan desa sendangsari dan materi terkait dengan seks dan gender, ideologi patriarkhi dan politik perempuan. Peta perpolitikan digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui bagaimana persebaran dan partisipasi politik perempuan di desa. Selanjutnya materi terkait seks, gender, ideologi patriarkhi dan politik perempuan diberikan oleh tim yang bertindak sebagai narasumber.

### **Metode Pelaksanaan**

#### **1. Curah pendapat dan dialog.**

Proses ini menjadi kunci untuk memahami peta pemahaman politik perdesaan mengenai keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di perdesaan. Diawali dengan curah pendapat sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk membedah tema dialog yakni tentang kesadaran berbangsa dan bermasyarakat, kondisi kenyataan di masyarakat tentang partisipasi politik dan hak politik perempuan. Selanjutnya melalui metode ini peserta mengemukakan berbagai kondisi nyata di lapangan untuk kemudian didiskusikan bersama tim pengabdian. Tim pengabdian memberikan stimulus/ penyadaran terkait dengan hak politik perempuan, sehingga peserta menjadi lebih memahami tentang hak politik perempuan.

#### **2. Metode ceramah**

Ceramah dilakukan sebagai salah satu pengenalan tentang kegiatan yang dilakukan serta pengenalan diri antara tim dan peserta. Selanjutnya memberikan pengetahuan tentang apa yang peserta bisa dapatkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dipadu dengan tanya jawab sebagai salah satu alternatif mendekatkan diri antara tim pengabdian dengan peserta sekaligus agar peserta menjadi lebih paham mengenai materi yang diberikan. Dengan metode ini target yang diinginkan dapat tercapai yaitu keberhasilan pendidikan hak politik perempuan dan pendidikan politik bagi pemuda perdesaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan peserta berjumlah 31 orang. Acara dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 dan dimulai pada pukul 14.00 – 17.30 WIB di Aula Balai Desa Sendangsari. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pengurus Karang taruna Desa Sendangsari. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah :

1. Mendiskusikan tema kegiatan pengabdian dengan disesuaikan kondisi sosial politik masyarakat Desa Sendangsari

2. Menentukan metode dan teknis pelaksanaan kegiatan
3. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan membentuk kepanitiaan.

Melalui berbagai macam agenda yang dilaksanakan dapat menghasilkan bentuk bekerjasama dengan panitia dari pengurus Karang taruna Desa Sendangsari. Ketua KT Desa Sendangsari menyampaikan bahwa topik yang dibahas dalam kegiatan ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat khususnya organisasi pemuda di Desa Sendangsari. Mengingat masih minimnya peran perempuan di Desa Sendangsari. Sehingga Ketua KT Desa Sendangsari berharap bahwa kegiatan ini menjadi sebuah pembelajaran dan membuka wacana teman-teman peserta secara luas tentang makna perpolitikan dan peran politik bagi perempuan. Ketua KT Desa Sendangsari juga berharap bahwa selanjutnya dapat terus melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi agar kegiatan organisasi juga diwarnai dengan pengalaman akademis dari para akademisi. Selain itu sinergitas antara kegiatan organisasi pemuda dan masyarakat bersama akademisi dapat terus terjalin sebagai suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Teman-teman pemuda memerlukan gagasan dan bimbingan dari para akademisi untuk membangun potensi SDM agar semakin berkembang dan seimbang.

Lurah Desa Sendangsari berharap agar kegiatan ini dapat menambah wawasan serta memapu diserap oleh pemuda di Desa Sendangsari untuk semakin termotivasi dan melaksanakan berbagai agenda perubahan agar peran perempuan semakin mapan sehingga mewarnai berbagai macam kegiatan organisasi masyarakat di Desa Sendangsari. Lurah Desa Sendangsari juga berharap bahwa kerjasama dengan UNY selanjutnya dapat dilaksanakan mungkin tidak hanya dengan Karang Taruna namun bisa bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain seperti PKK, BPD, kelompok tani, kelompok wisata, kelompok pensiunan dan sebagainya. Pada kesempatan tersebut Lurah Desa Sendangsari sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Pada tahap berikutnya merupakan agenda pendidikan I, II dan III yang dirancang sebagai alur proses pendidikan hak politik perempuan pemuda perdesaan. Agenda Pendidikan I merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan *brainstorming* terkait dengan pemetaan dan orientasi politik di Desa Sendangsari. Dengan dipandu oleh tim, peserta diajak untuk mendiskusikan terkait kondisi yang dialami di masing-masing wilayah. Mengingat peserta adalah perwakilan pemuda dari 18 dusun di wilayah Desa Sendangsari, maka metode yang kemudian dilakukan adalah dengan melakukan pendataan terkait kondisi riil mengenai posisi-posisi struktural dan kelembagaan di masing-masing dusun. Diantaranya yakni Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua Karang taruna Unit, ketua LPMD, Ketua Organisasi Sosial setempat. Dengan melihat porsi laki-laki dan perempuan maka diperoleh data bahwa hampir 100% dari seluruh pedusunan di Desa

Sendang sari posisi pimpinan struktural ditempati oleh warga yang berjenis kelamin laki-laki. Penempatan perempuan di posisi Sekretaris atau Bendahara. Mengenai alasan yang kemudian disampaikan adalah masih enggan nya perempuan untuk terlibat sebagai pimpinan di dalam sistem kemasyarakatan tersebut. Selain itu masalah waktu dan pembagian peran bahwasanya perempuan lebih banyak pada peran-peran domestik di rumah seperti mengurus anak, memasak dan mengatur keuangan. Begitu juga dengan perempuan yang memilih bekerja. Usai bekerja lebih banyak melaksanakan kegiatan di rumah dan menyerahkan urusan masyarakat kepada suami atau pihak laki-laki.

Berbagai alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bukan masalah laki-laki dan perempuan, tetapi pada masalah kriteria yang harus dipenuhi. Memang sudah ada kriteria sejak awal bahwa laki-laki yang diprioritaskan.
- b. Perempuan tidak bisa dipaksakan untuk memberi sambutan, memberikan pengarahan dan lain-lain. Padahal sudah banyak kesempatan yang telah diberikan pada perempuan.
- c. Menjadi permasalahan sebenarnya bukan kesempatan bagi perempuan yang kurang tetapi lebih pada perempuannya sendiri yang belum siap. Karena kebanyakan perempuan sendiri yang masih belum siap, belum pede dan sebagainya. Sehingga memerlukan *role models* yang membuat perempuan-perempuan lain termotivasi.

Agenda Pendidikan II merupakan kegiatan pemaparan terkait dengan kodrat perempuan dan laki-laki, perspektif kesetaraan gender dan hak politik perempuan. Pada kesempatan ini dengan dipandu oleh tim menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Peserta mendapatkan berbagai pengetahuan tentang seks dan gender, ideologi patriarkhi dan politik perempuan. Materi dari narasumber dikemas dengan menggunakan media *power point*. Pada kesempatan ini meskipun secara latar belakang pendidikan peserta berbeda-beda namun pemateri mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang tidak kaku sehingga peserta dapat menyerap materi yang disampaikan.

Agenda Pendidikan III merupakan bentuk kegiatan evaluasi dengan melakukan analisa terkait pemahaman peserta terhadap materi dan kondisi nyata di lapangan. Sehingga peserta menemukan berbagai macam bentuk kesadaran terkait kondisi nyata di lapangan. Menjadi menarik tatkala beberapa peserta menyatakan bahwa :

- a. Adanya keyakinan yang dilandasi dengan faktor religi tertentu bahwa menempatkan perempuan dengan landasan “surga itu di bawah telapak kaki ibu” sehingga justru pemberian peran terhadap perempuan yang terbatas itu sebagai sebuah jalan untuk menempatkan perempuan sebagai seseorang yang dihargai, disayangi dan dihormati sehingga tidak memerlukan beban serta aktivitas lain. Selain itu ada rasa “kurang pantas” jika perempuan banyak beraktivitas di dalam kegiatan masyarakat yang



umumnya dilaksanakan malam hari. Karena terdapat nilai-nilai kebiasaan yang ada di masyarakat yakni perempuan akan dianggap “kurang baik” jika pulang malam (lebih dari pkl 21.00 WIB).

- b. Adanya kekhawatiran di masyarakat selama ini bahwa ketika seorang perempuan diberikan keleluasaan, diberikan peran yang biasa dilakukan oleh laki-laki, jangan sampai perempuan menginjak-injak laki-laki. Dalam hal ini sangat melekatnya ideologi patriarki pada masyarakat. Dirasakan oleh masyarakat bahwa akan muncul dampak social jika perempuan mengambil peran lebih di ranah publik. Keluarga menjadi terlantar, tidak terurus dan sebagainya.
- c. Banyak kaum perempuan yang bekerja di pabrik, ternyata anak-anak diserahkan pada nenek atau kakek akhirnya pola pengasuhan anak diperoleh dengan gaya lama. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Bahkan ada anak yang tidak sekolah, anak menjadi nakal (minta perhatian lebih pada ibunya). Aktualisasi perempuan banyak terhalang dengan kebutuhan pengasuhan anak.

#### **1. Tingkat Pengetahuan Pemuda Perdesaan Terkait Hak Politik Perempuan**

Politik dalam pendekatan moral didefinisikan sebagai sesuatu yang mulia karena fungsi politik itu sendiri adalah kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan *good society* (Cholisin dkk, 2006 : 3). Lebih lanjut disebutkan bahwa warga (individu) yang baik memiliki kewajiban untuk tidak melecehkan warga yang lain, berupaya mencegah agar jangan sampai ada orang yang hak dan kebebasannya mengalami pelecehan dari warga lain, dan membantu korban pelecehan kemanusiaan. Oleh sebab itu tingkat pengetahuan pemuda dalam hal ini perdesaan terkait hak politik menjadi cukup menarik. Peran pemuda di perdesaan cukup sentral dalam merumuskan sistem tata kelola desa sehingga partisipasi masyarakat menyeluruh dan terbuka.

Politik dalam pendekatan kekuasaan masih dari sumber yang sama disebutkan sebagai cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga manusia sebagai warga negara memiliki cara-cara untuk dapat memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Pada hakekatnya setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan struktur diferensiasi sosial lainnya. Ada berbagai pola pemetaan politik pada suatu masyarakat. Persebaran politik tersebut tentunya menjamin keberadaan hak politik semua masyarakat.

Melalui agenda pendidikan hak politik perempuan dilakukan kegiatan *brainstorming* dengan melihat kondisi kenyataan di lapangan mengenai tatanan

struktur sosial masyarakat berupa lembaga sosial dan organisasi sosial. Pada saat itu dengan data yang diperoleh bahwa struktur atau tatanan sistem dalam setiap lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat memang menempatkan laki-laki sebagai pemangku jabatan tertinggi atau pengambil keputusan dan perempuan berada di kelas kedua atau pelaksana keputusan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi yang ditemukan bahwa dari 18 dusun di Desa Sendangsari dipimpin oleh laki-laki, pada organisasi sosial kecenderungan ketua juga laki-laki bahkan dari pengurus Karang Taruna didominasi juga oleh laki-laki. Posisi perempuan memang selama ini masih pada posisi wakil atau mengurus permasalahan administrasi dan keuangan.

Berbagai informasi yang disampaikan peserta cukup bervariasi. Ada yang mengemukakan bahwa memang pemimpin itu memang harus laki-laki dengan dasar aturan agama bahwa seorang pemimpin adalah laki-laki. Selanjutnya adanya pemahaman bahwa ketika perempuan terlalu banyak beraktivitas di lingkungan publik seperti organisasi atau lembaga desa maka urusan domestik tidak tercapai. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa jika terlalu sibuk untuk urusan publik maka aktivitas domestik memerlukan bantuan pihak ketiga yang berdampak pada pengeluaran ekonomi semakin besar serta belum tentu pola pengasuhan anak terjamin. Sehingga muncul ketakutan dan kekhawatiran ketika ada campur tangan pihak ketiga di dalam rumah tangga. Informasi berikutnya adalah kenyataan bahwa sebenarnya dari perempuan yang ada di Desa Sendangsari lah yang masih memiliki pola pikir dan pemahaman masing-masing sehingga enggan jika banyak beraktivitas di ruang publik. Maksudnya adalah adanya keengganan untuk menjadi sosok yang diprioritaskan di masyarakat dan cenderung menyerahkan kepada laki-laki. Sehingga meskipun ada kesempatan maka yang banyak mengisi kesempatan tersebut adalah laki-laki.

Manusia hidup dalam berbagai masyarakat yang berlainan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian manusia adalah manusia dengan semua hak manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaan. Sehingga tentunya tidak dapat dibenarkan karena perbedaan sosial budaya kemudian implemtnasi terhadap prinsip-prinsip hak warga negara tidak diindahkan (Cholisin,dkk 2006 : 119). Dari berbagai informasi di atas dapat dirumuskan bahwa pengetahuan dan pemahaman pemuda terkait partisipasi politik perempuan di Desa Sendangsari juga dipengaruhi latar belakang sosial budaya dan perubahan di masyarakat. hal ini terletak pada adanya ajaran agama sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keberadaan atau posisi seorang pemimpin dalam organisasi dan masyarakat.

Pembagian peran domestik kepada pihak perempuan dan urusan publik kepada laki-laki memperlihatkan bahwa ideologi patriarkhi masih cukup melekat. Latar

belakang kondisi sosial budaya masyarakat desa mewarnai berbagai macam keputusan dalam kegiatan masyarakat. Peran pihak ketiga (pembantu, asisten rumah tangga, saudara, lembaga) yang kurang diminati. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketakutan masyarakat untuk menerima perubahan dalam proses kehidupan masyarakat. Sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang akan cenderung susah menerima pola-pola yang baru.

Keputusan politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Adapun rambu-rambu mengenai partisipasi politik yaitu : Pertama, partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku berupa sikap dan orientasi. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik ( Ramlan Surbakti, 2007 : 141 ). Partisipasi politik merupakan langkah penting dalam setiap kegiatan politik. Tanpa partisipasi politik, maka segala ide-ide tentang suatu perubahan politik tidak akan terlaksana. Keaktifan warga dalam politik juga dicerminkan dari partisipasi mereka dalam mengikuti Pemilu sebagai kegiatan politik praktis dan partisipasi dalam keputusan politik lainnya. Partisipasi politik juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan politik, mengingat apabila pendidikan politik di wilayah tertentu masih kurang tentunya berdampak pada pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sehingga pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik. Pola pikir dan pemahaman perempuan di Desa Sendangsari yang minim terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam urusan politik di organisasi dan masyarakat mempengaruhi peran dan partisipasi politik di masyarakat.

## **2. Faktor Minimnya Partisipasi Politik Perempuan di Desa Sendangsari**

Melihat kondisi yang terjadi di lapangan dapat diperoleh informasi bahwa masih minimnya partisipasi politik perempuan di Desa Sendangsari karena berbagai faktor secara umum yakni :

- a. Adanya sistem kebijakan dan peraturan masyarakat yang lebih banyak memberikan akses bagi laki-laki. Terlihat pada rumusan bahwa bukan masalah laki-laki dan perempuan, tetapi pada masalah kriteria yang harus dipenuhi. Memang sudah ada kriteria sejak awal bahwa laki-laki yang diprioritaskan.
- b. Adanya keterbatasan perempuan yang menyangkut kapasitas SDM. Hal ini nampak pada rumusan perempuan tidak bisa dipaksakan untuk memberi sambutan, memberikan pengarahan dan lain-lain. Padahal sudah banyak kesempatan yang telah diberikan pada perempuan. Artinya bahwa dalam situasi

tertentu perempuan sebenarnya memiliki kesempatan namun masih ada rasa kurang percaya diri pada beberapa perempuan untuk dapat tampil atau memimpin di depan umum. Ada tekanan sosial tertentu yang dirasakan perempuan.

- c. *Role models* menjadi sangat diperlukan di dalam perkembangan sebuah masyarakat. Hal ini nampak pada rumusan menjadi permasalahan sebenarnya bukan kesempatan bagi perempuan yang kurang tetapi lebih pada perempuannya sendiri yang belum siap. Karena kebanyakan perempuan sendiri yang masih belum siap, belum pede dan sebagainya. Sehingga memerlukan *role models* yang membuat perempuan-perempuan lain termotivasi.

Pada kegiatan berikutnya menekankan pada aspek substansial tentang respon balik peserta mengenai materi dan kondisi nyata di lapangan. Pada tahap ini dapat dikemukakan berbagai pemikiran yang lebih lanjut yakni adanya analisa kondisi lapangan sebagai bentuk penyadaran dan pemahaman peserta terhadap materi yang didiskusikan. Sehingga melalui analisis tersebut peserta dapat merumuskan bahwa menjadi faktor internal dan eksternal terbatasnya partisipasi perempuan di lingkungan masyarakat selama ini.

a. Faktor Internal

- 1) Perempuan kurang memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya
- 2) Perempuan sering kurang percaya diri
- 3) Kesadaran diri tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam keluarga dan lingkungan yang masih terbatas.

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya manipulasi budaya dan agama dalam kepentingan partisipasi politik perempuan.
- 2) Keterbatasan akses terkait sistem sosial masyarakat
- 3) Penerimaan secara kultural dari masyarakat

### **3. Pelaksanaan Pendidikan Hak Politik Perempuan bagi Pemuda di Desa Sendangsari**

Pada prinsipnya kegiatan pendidikan hak-hak politik perempuan bagi pemuda di Desa Sendangsari dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dengan mekanisme kegiatani terbagi menjadi 3 sesi yakni Agenda pendidikan I (*brainstorming*), Agenda Pendidikan II (Pemaparan Materi) dan Agenda Pendidikan III (Analisis Permasalahan Lapangan). Melalui kegiatan ini fasilitator menyampaikan tentang seks dan gender, ideologi patriarkhi dan politik perempuan. Dalam kajian seks dan gender membahas terkait dengan perbedaan antara perspektif seks dan gender, mengkaji definisi kultur

dan biologi pada laki-laki dan perempuan serta bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Selanjutnya membahas mengenai ideologi patriarki dan pada akhir materi terkait dengan politik perempuan. Politik perempuan membahas mengenai partisipasi politik perempuan.

Pemuda diperlukan sebagai sebuah agen yang mampu menjembatani antara pertarungan sistem atau institusi dalam kondisi pemerintahan dan masyarakat. Apabila pemuda tidak memiliki agenda perubahan dalam sebuah masyarakat, pemuda hanya akan berlaku sebagai kelompok penerima manfaat saja. Bahkan pada beberapa kasus ekstrim hanya dapat bertindak sebagai “komunitas lokal yang terpinggirkan” (Sirimorok, 2010:9). Oleh karena itu disampaikan dalam agenda pendidikan bahwa pengaruh pemuda khususnya perempuan terhadap pengambilan keputusan mencakup beberapa aspek yaitu :

- a. Akses, yaitu pengakuan, peluang, dan jaminan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan
- b. Penyadaran, yaitu proses penyadaran dan pengenalan identitas pribadi perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial dan politik
- c. Partisipasi, yaitu keterlibatan perempuan secara penuh dalam semua tingkatan pengambilan keputusan
- d. Kontrol, yaitu kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan
- e. Kesejahteraan, yaitu hak yang sama bagi setiap perempuan untuk mendapatkan manfaat dari setiap keputusan serta hak untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi seperti modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja.

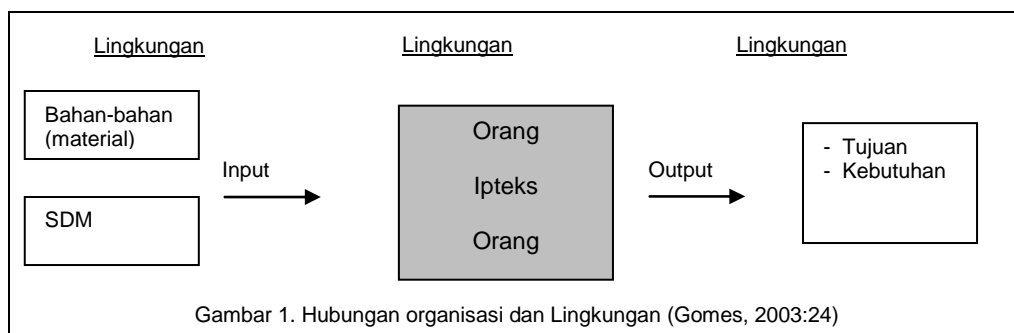
Perempuan harus ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi: isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman; isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau; masalah kesehatan dan pendidikan anak; isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa; serta isu-isu kekerasan seksual. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti:

- a. Diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya; penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama.

b. Diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Misalnya; kasus perceraian. Pada saat penyampaian materi, para peserta sosialisasi sangat antusias, hal ini juga ditegaskan dengan adanya beberapa pertanyaan seputar memaknai kodrat perempuan dan laki-laki, perspektif kesetaraan gender dan hak politik perempuan.

Melalui analisis permasalahan lingkungan dikemukakan berbagai pemikiran yang lebih lanjut yakni adanya analisa kondisi lapangan sebagai bentuk penyadaran dan pemahaman peserta terhadap materi yang didiskusikan. Sehingga melalui analisis tersebut peserta dapat merumuskan bahwa menjadi faktor internal dan eksternal terbatasnya partisipasi perempuan di lingkungan masyarakat selama ini. Selain itu ditemukan bahwa dampak yang selama ini muncul dengan adanya partisipasi perempuan di dalam kegiatan masyarakat (ranah publik) adalah semakin diperlukannya partisipasi pihak ke-3 dalam kegiatan rumah tangga. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mampu membantu dalam mengurus anak seperti orang tua (nenek/kakek), pembantu atau sekolah dengan sistem *fullday school*. Selain itu adanya keterbukaan baik dalam keluarga maupun masyarakat mengenai pembagian peran dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki menjadi faktor pendukung yang hendaknya dapat dibiasakan dari forum-forum kecil. Sehingga pada akhirnya perempuan akan memiliki rasa percaya diri. Hal ini menjadi temuan yang dapat ditindaklanjuti upaya pemecahannya bagi keluarga.

Hal inilah yang kemudian dapat dirumuskan dalam keterkaitan antara organisasi kepemudaan dan pengaruhnya dalam mencakup peran dan partisipasi politik perempuan. Organisasi kepemudaan menjadi arena yang cukup sentral untuk dapat menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia anggota di dalamnya serta memberikan pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.



Begitu pula dengan konteks masyarakat perdesaan. Hubungan antara organisasi dan lingkungan akan sangat mempengaruhi proses pendidikan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu jika terdapat pola-pola pendidikan politik secara kultural melalui

organisasi masyarakat atau pemuda itu sendiri maka akan terjadi proses penyadaran secara konstruktif terhadap peran dan partisipasi politik pemuda khususnya perempuan.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi perempuan yang belum maksimal dibandingkan dengan partisipasi laki-laki di lingkungan organisasi, kegiatan masyarakat dan tatanan struktural pemerintahan desa adalah salah satu fenomena di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY. Tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta terkait dengan partisipasi perempuan pada aktivitas politik diantaranya adanya kajian agama sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keberadaan atau posisi seorang pemimpin dalam organisasi dan masyarakat, pembagian peran domestik kepada pihak perempuan dan urusan publik kepada laki-laki, peran pihak ketiga (pembantu, asisten rumah tangga, saudara, lembaga) yang kurang diminati, pola pikir dan pemahaman perempuan yang minim terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam urusan politik di organisasi dan masyarakat.

Faktor minimnya partisipasi perempuan di bidang politik dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi adanya manipulasi budaya dan agama dalam kepentingan partisipasi politik perempuan, keterbatasan akses terkait sistem sosial masyarakat, dan penerimaan kultural dari masyarakat. Faktor Internal meliputi keberadaan perempuan yang kurang memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, perempuan sering kurang percaya diri, kesadaran diri tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam keluarga dan lingkungan yang masih terbatas.

Melalui kegiatan pendidikan memberikan berbagai macam pengalaman dan pembelajaran terkait dengan hak politik perempuan khususnya dalam menghadapi kompleksitas kegiatan di masyarakat. Dengan metode diskusi, tanya jawab, ceramah dan *games* maka berbagai pengetahuan dan materi tersebut didiskusikan dengan peserta. Setelah mendapatkan materi peserta memiliki pengetahuan tentang berbagai macam kajian mengenai seks dan gender, ideologi patriarki dan politik perempuan. Dengan kegiatan ini peserta memahami hak politik perempuan yang hendaknya dapat diakses dan dilaksanakan di masyarakat. Selain itu dibutuhkannya pembagian peran secara terbuka antara laki-laki dan perempuan yang dapat dibiasakan di dalam keluarga dan forum-forum kecil di masyarakat. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai hak politik sebagai warga negara.

## **SARAN**

Kegiatan ini semoga dapat ditindaklanjuti pada tahap berikutnya agar terbentuk keberlanjutan mengenai program pendampingan terutama untuk membangun potensi SDM masyarakat khususnya pemuda di Desa Sendangsari. Selain itu akan lebih menarik jika kemudian dapat dibentuk sebuah program Pendampingan yang melibatkan teman sebaya karena pembelajaran melalui teman sebaya pada usia pemuda akan membawa hasil yang lebih menarik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Karang Taruna Desa Sendangsari. 2013. *Profil Karang Taruna Desa Sendangsari*. Yogyakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta : Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : PT SUN.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-9. Bandung : Rosda Karya.
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Sirimorok, Nurhadi. 2010. *Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta : Insist Press.